

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Teori Kriminologi, Kejahatan, dan Teori – Teori Dalam Kriminologi**

##### **1. Definisi Kriminologi**

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang perkembangannya sejalan dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi sejak tahun 1850. Bidang kajian ini mengkaji kejahatan melalui berbagai sudut pandang. Secara etimologis, kriminologi berasal dari gabungan kata "crime" yang bermakna kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Paul Topinard (1830–1911), seorang antropolog asal Prancis.

Para ahli kriminologi memiliki beragam definisi mengenai bidang ilmu ini. Michael dan Adler menjelaskan kriminologi sebagai studi komprehensif yang meliputi perilaku kriminal, karakteristik pelaku kejahatan, faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi mereka, serta interaksi mereka dengan sistem peradilan dan masyarakat. Sementara itu, Wood mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan pengetahuan, baik empiris maupun teoritis, yang berkaitan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, termasuk reaksi sosial terhadap keduanya.<sup>1</sup>

Selanjutnya, Moeljanto menyatakan bahwa kriminologi bertujuan untuk memahami apa yang menyebabkan seseorang berperilaku jahat. Apakah sebenarnya disebabkan oleh sifat jahat yang dimiliki individu tersebut ataukah dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di sekitarnya, baik dari segi sosiologis maupun ekonomis. Oleh karena itu, jika faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi, maka di samping penjatuan hukuman, tindakan yang tepat dapat diambil agar individu tersebut tidak mengulangi perbuatannya, atau agar orang lain tidak melakukan hal serupa. Dalam konteks ini,

---

<sup>1</sup> Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, 2001. Kriminologi. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm 12.

khususnya di negara-negara Anglo-Saxon, kriminologi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Biologi kriminal, yang mengkaji faktor-faktor internal individu yang memicu tindakan mereka, baik secara fisik maupun mental.
- 2) Sosiologi kriminal, yang berupaya menemukan alasan yang berasal dari konteks sosial tempat individu berbuat kejahatan yang berbeda.
- 3) Kebijakan kriminal, meliputi langkah-langkah yang perlu diambil di lingkungan sekitar agar orang lain terhindar dari melakukan tindakan yang sama.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* mendefinisikan kriminologi sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai gejala – gejala kejahatan. Definisi ini mencakup studi dan analisis ilmiah terhadap informasi, keseragaman, dan pola, serta reaksi masyarakat terhadap faktor – faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan dan pelaku kriminal.<sup>2</sup>

W E. Noach, seorang profesor di Jakarta yang juga merupakan salah satu penggagas Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Ia merupakan penggagas awal pengajaran kriminologi di Indonesia melalui karyanya yang bertajuk *criminology* yang membagi kriminologi menjadi:

- a. Kriminologi dalam pengertian yang lebih luas mencakup penggunaan ilmu alam dan disiplin ilmu lainnya, seperti kedokteran kehakiman (forensik). Ilmu ini meliputi berbagai bidang, termasuk daktiloskopi atau ilmu sidik jari, serta kimia kehakiman yang berfokus pada studi tentang keracunan (toksikologi).

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hal 12.

- b. Kriminologi dalam pengertian yang sempit adalah ilmu yang mengkaji penyebab dan dampak dari kriminaitas, yaitu tindakan kejahatan yang dianggap buruk.

Dalam kriminologi teoritis, Bonger menjelaskan bahwa bidang ini merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, yaitu:

- a. Antropologi Kriminal, mempelajari manusia jahat dari perspektif biologis dan termasuk dalam kategori ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminologi, mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial, dengan fokus pada pengaruh faktor sosial terhadap kemunculan kejahatan (etiologi sosial).
- c. Psikologi Kriminal, mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologis, termasuk penelitian terhadap kepribadian pelaku kejahatan.
- d. Psiko-patologi Kriminal dan Neuro-patologi Kriminal, adalah ilmu kejahatan yang berkaitan dengan gangguan jiwa atau psikiatri.
- e. Penologi, mempelajari perkembangan, pengertian, dan manfaat hukuman.f. Kriminalistik, merupakan ilmu yang digunakan untuk melakukan investigasi terhadap suatu tindak kejahatan.<sup>3</sup>

E.H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang kejahatan sebagai sebuah kejadian sosial, termasuk bagaimana hukum dibuat dan bagaimana masyarakat merespons tindakan yang melanggar hukum tersebut.

Sutherland mengelompokkan kriminologi menjadi tiga bidang studi utama:

- a. Sosiologi hukum mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berakibat pada sanksi. Artinya, hukum memiliki peran sentral dalam menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan. Bidang ini juga mengkaji akar

---

<sup>3</sup> J.E. Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5.

penyebab kejahatan serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

- b. Etiologi kriminal merupakan cabang kriminologi yang berfokus pada pencarian penyebab terjadinya kejahatan, sehingga menjadikannya kajian yang paling utama dalam bidang ini.
- c. Penologi mempelajari tentang hukuman, namun Sutherland juga memasukkan di dalamnya upaya-upaya pengendalian kejahatan, baik melalui tindakan represif maupun preventif..

Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kriminalitas, Walter Launden menyatakan bahwa tanda-tanda yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Fenomena urbanisasi di kalangan pemuda dari daerah pedesaan menuju pusat-pusat kota sangat besar jumlahnya dan sulit untuk dihindari.
- b. Terdapat gesekan antara tradisi norma yang berlaku di desa dengan norma-norma baru yang muncul selama proses perubahan sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Hal ini mengaburkan karakteristik individu yang berkaitan dengan sistem kontrol sosial tradisional, sehingga komunitas, khususnya kaum remaja, menghadapi "samarpola" (penyimpangan dari norma) dalam menentukan tindakan mereka.

## **2. Kejahatan**

Tindak kriminalitas merupakan isu yang selalu ada dalam setiap lingkungan masyarakat. Munculnya kejahatan serupa dengan penyakit dan kematian yang terus berulang, mengikuti siklus perubahan waktu. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi kejahatan, bertujuan untuk menekan jumlahnya dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali menjadi bagian positif dari masyarakat.

Kejahatan bukan hanya menjadi masalah bagi Indonesia atau satu negara saja, melainkan menjadi perhatian global yang dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Menurut Siichiro Ono, kejahatan adalah fenomena universal yang tidak hanya meningkat dari segi kuantitas, tetapi juga kompleksitas, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dibandingkan masa lalu.<sup>4</sup>

Kejahatan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "crime" dan dalam bahasa Belanda disebut "misdaad", yang menandakan tindakan atau perilaku yang melanggar hukum. Secara etimologi, kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan norma-norma etika manusia dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga dijauhi dan tidak disetujui oleh komunitas karena sifatnya yang melanggar hukum dan ketentuan pidana. Van Bemmelen menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap tindakan yang tidak etis dan berbahaya, yang dapat menyebabkan gangguan dalam satu komunitas tertentu. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengomplain dan menyuarakan penolakannya terhadap tindakan tersebut.<sup>5</sup>

Edwin Sutherland dan Donald Cressey mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil pembelajaran, bukan sesuatu yang diperoleh secara genetik. Oleh karena itu, kejahatan dipahami melalui interaksi dengan individu lain lewat komunikasi. Inti dari proses pembelajaran mengenai kejahatan terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat pribadi dan dekat.<sup>6</sup>

Kejahatan telah ada sejak awal peradaban manusia. Seiring dengan kemajuan peradaban, jumlah aturan yang ada juga meningkat, diikuti dengan banyaknya pelanggaran. Sering kali, kejahatan dianggap sebagai cerminan dari peradaban itu sendiri. Definisi kejahatan bersifat relatif dan terus berubah, baik dari perspektif hukum

---

<sup>4</sup> Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 33.

<sup>5</sup> Ibid. hal. 53.

<sup>6</sup> Ibid. hal. 54.

(definisi legal tentang kejahatan) maupun dalam konteks pandangan masyarakat (definisi sosiologis tentang kejahatan).<sup>7</sup>

Secara etimologi, kejahatan mengacu pada perilaku buruk manusia, seperti membunuh, mencuri, merampok, menipu, dan merusak. Dalam konteks hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang ditentukan oleh pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mendetail tentang pelanggaran, tetapi mengatur tindak pidana tersebut dalam bagian kedua KUHP, yaitu dari Pasal 104 sampai 188. Oleh karena itu, kejahatan dipandang bukan hanya dari aspek moral, tetapi juga dari perspektif hukum yang mengatur dan mendefinisikan tindakan-tindakan yang dianggap melawan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>8</sup>

R. Soesilo menyatakan dalam karyanya bahwa dalam pandangan hukum, kejahatan adalah semua tindakan manusia yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Contohnya, dijelaskan bahwa tindakan membunuh termasuk dalam Pasal 338 KUHP, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai hukuman penjara selama maksimum lima belas tahun.<sup>9</sup>

Romli Atmasasmita, tindakan kriminal dianggap sebagai hasil yang wajar dari interaksi antara pelaku dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kejahatan tidak dipahami sebagai hal yang terpisah, melainkan keistimewaannya terletak pada sifat respons dari lingkungan (masyarakat) terhadap perilaku yang dimaksud.<sup>10</sup>

Lebih lanjut A.S. Alam mengemukakan dua sudut pandang tentang kejahatan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 15

<sup>8</sup> R. Sugandhi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Usaha Nasional.

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, hal.13.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.58.

- a. Dari sudut pandang hukum, kejahatan didefinisikan sebagai setiap perilaku yang melanggar hukum pidana, di mana batasan ini menegaskan bahwa meskipun suatu tindakan mungkin dianggap berat atau tidak etis, selama tindakan tersebut tidak dilarang oleh undang – undang, maka tindakan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Sebagai contohnya, tindakan seorang perempuan yang terlibat dalam porstitusi tidak diatur sebagai tindakan yang dilarang dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Meskipun porstitusi sering dipandang sebagai negatif dari agama, adat istiadat, dan kesusilaan, secara hukum, tindakan tersebut belum dapat didefinisikan sebagai kejahatan karena tidak melanggar hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa definisi kejahatan dalam konteks hukum tidak selalu sejalan dengan norma – norma moral atau sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga menciptakan perdebatan mengenai batasan antara tindakan yang dianggap salah secara etika dan tindakan yang secara hukum tidak dapat dihukum.
- b. Dari perspektif sosial (kejahatan dari tinjauan sosiologis). Definisi kejahatan dalam konteks ini adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang masih berlaku di masyarakat.

Gerson W. Bawengan juga telah menjelaskan tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing – masing, yaitu sebagai berikut : <sup>11</sup>

- a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam konteks ini adalah suatu pemahaman yang mencakup pelanggaran terhadap kebiasaan, cara hidup, kelayakan, serta nilai-

---

<sup>11</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal. 27.

nilai yang dihasilkan dari tradisi, yang menghasilkan jawaban dalam bentuk sanksi atau pengucilan.

b. Pengertian secara religious

Kejahatan dalam konteks ini adalah mengaitkan konsepsi kejahatan dengan kesalahan moral, dan setiap bentuk kesalahan moral bisa menghadapi ancaman siksaan Api Neraka bagi jiwa yang bersalah.

c. Pengertian secara yuridis

Tindak pidana yang dimaksud dalam konteks hukum di sini, contohnya dalam KUHP, hanya merujuk kepada tindakan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal buku kedua, yang dikenal sebagai kejahatan. Di samping KUHP, kita juga menemukan hukum pidana khusus, yang mencakup bidang militer, perpajakan, hukum pidana ekonomi, atau peraturan lain yang mengidentifikasi suatu tindakan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan pembahasan di atas, definisi tindak pidana kejahatan dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang. Intinya, suatu perbuatan dianggap kriminal jika melanggar norma sosial yang berlaku, atau telah diatur sebagai kejahatan dalam undang-undang. Mengingat kejahatan merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman mendalam mengenai konsep kejahatan menjadi sangat penting.

### 3. Pengertian Kejahatan Menurut Sosiologi

Dalam kajian sosiologi, tindakan kriminal bukan sekadar kerugian bagi individu, melainkan juga gangguan serius bagi masyarakat yang menyebabkan ketidakseimbangan, keresahan, dan hilangnya ketertiban. Teori-teori kriminologi sosiologis berusaha mengungkap akar penyebab perbedaan tingkat kejahatan di berbagai kelompok masyarakat. Teori-teori ini umumnya dikelompokkan menjadi tiga,

yaitu teori strain, teori anomie budaya, dan teori kontrol sosial. Teori strain dan anomie budaya menekankan faktor-faktor sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, sedangkan teori kontrol sosial menawarkan sudut pandang yang berbeda. Lebih lanjut, dari sudut pandang sosiologis, kriminalitas merupakan masalah krusial dalam struktur sosial karena tindakan pelaku mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan publik. Kejahatan seringkali dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan keserakahan, mengabaikan keselamatan dan hak milik orang lain. Pelaku kejahatan yang terorganisir seringkali bekerja sama dengan pejabat korup untuk mencapai tujuan mereka melalui jalur-jalur pemerintahan.<sup>12</sup>

#### **4. Teori – Teori Dalam Kriminologi**

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Asosiasi Diferensial, yang dikemukakan oleh Sutherland, berargumen bahwa tindakan kriminal diperoleh melalui interaksi dengan orang-orang yang melanggar aturan sosial, termasuk hukum. Proses pembelajaran ini tidak hanya melibatkan metode kejahatan yang konkret, namun juga mencakup alasan, motivasi, sikap, dan pembenaran yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan norma sosial.

Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut Sutherland mengemukakan bahwa :

1. Perilaku kriminal dianalisis melalui interaksi dengan orang lain, yang terjadi melalui proses komunikasi.

---

<sup>12</sup> Syahni, A. (1897),. Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi. Bina Aksara

2. Satu aspek krusial dari penelitian mengenai perilaku kriminal terkait erat dengan individu-individu yang terlibat dalam kejahatan, yaitu adanya interaksi langsung dalam lingkungan sosial.

3. Melakukan penyelidikan terhadap perilaku kriminal mencakup analisis terhadap metode yang dipakai dalam melakukan kejahatan serta alasan atau motivasi di balik tindakan tersebut.

b. Teori Tegangan menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia cenderung melanggar hukum atau norma serta peraturan, terutama ketika ada kesenjangan signifikan antara tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Dalam situasi seperti ini, jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui metode ilegal.

Dengan kata lain, sifat mendasar manusia sebenarnya baik, namun tekanan sosial dapat memicu stres, ketegangan, dan pada akhirnya mendorong tindakan kriminal.

c. Teori Kontrol Sosial berargumen bahwa pandangan ini tidak menganggap individu sebagai patuh terhadap hukum, melainkan memiliki sudut pandang yang berbeda, di mana individu perlu diajari untuk menghindari tindakan kriminal. Kita semua lahir dengan kecenderungan untuk melanggar aturan. Dalam pandangan para ahli teori kontrol sosial, kenakalan dipandang sebagai konsekuensi alami dari kegagalan individu dalam membentuk dorongan internal untuk perilaku yang sesuai dengan norma hukum.<sup>13</sup>

## **5. Teori Identitas dan Identitas Sosial**

Identitas adalah atribut unik yang dimiliki oleh seseorang atau anggota dari suatu komunitas atau kategori sosial tertentu. Konsep ini berasal dari istilah Latin "idem," yang berarti "sama." Dengan demikian, identitas mencakup makna kesetaraan atau

---

<sup>13</sup> Sutherland, E. H. (2007). Teori Asosiasi Diferensial. Dalam: S. H. S. S. (Ed.), Kriminologi: Teori dan Praktik (hlm. 45-60). Jakarta: Rajawali Pers.

kesatuan dengan orang lain dalam konteks tertentu, serta mengandung makna perbedaan. Selain itu, identitas juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri yang membedakan satu individu atau kelompok dari yang lainnya. Oleh karena itu, identitas memiliki dua aspek, yaitu kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dalam identitas terjadi ketika seseorang memiliki persamaan dengan orang lain dalam kelompok yang sama, sementara perbedaan muncul ketika individu atau kelompok memiliki sifat tertentu yang memisahkan mereka dari individu atau kelompok lainnya.

Identitas yang dimiliki seseorang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu identitas pribadi dan identitas sosial. Identitas pribadi merupakan hasil dari proses penemuan diri yang dilakukan oleh individu itu sendiri, ditambah dengan penilaian yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Identitas ini mencakup ciri khas yang membuat seseorang berbeda dari yang lainnya, yang bisa berupa karakteristik fisik seperti wajah dan tinggi badan, atau bisa juga mencakup aspek psikologis seperti sifat, perilaku, dan cara berbicara. Di sisi lain, identitas sosial merupakan hasil dari penilaian orang lain, di mana identitas ini adalah pengakuan atau penetapan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut. Dengan demikian, identitas sosial dapat didefinisikan sebagai kesadaran individu akan posisinya sebagai anggota suatu kelompok, serta pengakuan yang diberikan oleh kelompok tersebut kepada individu sebagai bagian dari mereka.<sup>14</sup>

Teori identitas sosial dan teori identitas merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami bagaimana individu membentuk dan memahami identitas mereka. Teori identitas sosial, yang diperkenalkan oleh Henri Tajfel, menekankan bahwa identitas individu tidak hanya ditentukan oleh karakteristik pribadi, tetapi juga oleh keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Dalam konteks ini, identitas

---

<sup>14</sup> Giles, H., & Johnson, P. (1987). *The Social Psychology of Language*, New York: Routledge, hlm.69

sosial dapat dipahami sebagai bagian dari konsep diri yang berasal dari pengakuan individu terhadap kelompok yang mereka anggap relevan, yang mencakup nilai – nilai, norma, dan makna yang dibawa oleh kelompok tersebut

Identitas sebagai refleksi diri mencakup bagaimana individu melihat dan memahami diri mereka sendiri dalam konteks sosial yang lebih luas. Proses ini melibatkan kategorisasi diri, di mana individu mengelompokkan diri mereka berdasarkan berbagai kriteria, seperti etnisitas, gender, atau afiliasi politik. Dalam konteks pembentukan identitas, penting untuk memahami bahwa identitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Faktor – faktor seperti pengalaman hidup, interaksi sosial, dan perubahan lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana individu melihat diri mereka dan kelompok yang mereka ikuti. Oleh karena itu, teori identitas sosial dan teori identitas memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana identitas terbentuk dan berkembang dalam konteks sosial yang kompleks.<sup>15</sup>

Identitas sosial merujuk pada pengakuan individu terhadap kategori sosial atau kelompok tertentu yang mereka miliki. Kelompok sosial terdiri dari sekelompok orang yang saling mengidentifikasi sebagai anggota dari kategori sosial yang sama. Melalui proses perbandingan sosial, individu mengelompokkan diri mereka dan memberi label pada diri mereka sebagai bagian dari kelompok (in-group) yang berbeda dari komponen utama dalam proses kategorisasi diri. Yang paling pertama adalah harga diri, yang dimana dalam hal ini mencerminkan aspek evaluatif dari identitas, dan yang kedua adalah komitmen terhadap identitas, yang mencakup aspek psikologis dari pengakuan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Stets, J. E., Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. *Social Psychology Quarterly*, 63(3), 224 - 237

<sup>16</sup> Ellemers, N., Van Rijswijk, W., Roefs, M., & Simons, C. (1997). Bias in intergroup perceptions: Balancing group identity with social reality. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23(2), 186-198.

Terdapat dua pendekatan utama dalam memahami identitas, yaitu teori identitas dan teori identitas sosial. Dalam kerangka teori identitas, proses kategorisasi diri sangat penting untuk pembentukan identitas individu, yang bergantung pada penamaan atau pengelompokan yang dilakukan melalui pembelajaran budaya. Simbol – simbol yang digunakan dalam konteks ini berfungsi untuk menentukan posisi individu, yang dikenal sebagai peran. Di sisi lain, teori identitas sosial juga memperhatikan aspek struktural dalam masyarakat. Inti dari identitas terletak pada individu yang memiliki peran yang berkaitan dengan diri mereka, serta makna dan harapan yang terkait dengan peran tersebut. Harapan dan makna ini membentuk norma yang mengarahkan perilaku individu dalam interaksi sosial.<sup>17</sup>

Menurut perspektif teori identitas sosial, identitas sosial adalah elemen krusial dari identitas seseorang. Identitas sosial ini memengaruhi nilai – nilai fundamental dalam kehidupan, seperti harga diri, afiliasi, dan rasa aman individu<sup>18</sup>. Oleh karena itu, identitas sosial merupakan komponen dari konsep diri individu yang terbentuk dari pemahamannya selama berada dalam kelompok, di mana ia secara aktif menginternalisasikan nilai – nilai, berpartisipasi, serta membangun rasa kepedulian dan kebanggan terhadap kelompok tersebut.<sup>19</sup>

Asumsi tentang pemahaman identitas sosial menurut Tajfel dalam buku Hogg & Abrams (2000) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang selalu berupaya untuk menjaga atau meningkatkan harga dirinya: mereka berusaha menciptakan konsep diri yang positif.

---

<sup>17</sup> Stets, J. E., & Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. *Social Psychology Quarterly*, 63(3), 224–237.

<sup>18</sup> Spinner-Halev, J., & Theiss-Morse, E. (2003). National identity and self-esteem. *Perspectives on Politics*, 1(3), 515–532. <https://www.jstor.org/stable/3688709>

<sup>19</sup> Afif, M. (2015). Identitas Sosial dan Konsep Diri. *Jurnal Psikologi*, hlm. 2.

2. Kelompok sosial atau kategori dan anggotanya terkait dengan makna nilai yang bisa bersifat positif atau negatif. Identitas sosial dapat bersifat positif atau negatif, bergantung pada evaluasi (yang merujuk pada konsensus sosial, termasuk antarkelompok) dari kelompok itu yang memengaruhi identitas sosial individu.
3. Penilaian dari suatu kelompok berusaha untuk menentukan serta menjadi acuan bagi kelompok lain secara spesifik melalui perbandingan sosial dalam bentuk nilai-nilai atribut atau karakteristik.k.

## **B. Definisi Identitas**

### **1. Konsep Identitas**

Dalam kajian epistemologi, konsep identitas berakar dari kata "identity" yang berarti keserupaan atau kesamaan suatu hal. Identitas umumnya dimaknai sebagai kesadaran akan keutuhan dan kesinambungan diri, yang membentuk sebuah keunikan. Keutuhan dan kesinambungan ini meliputi seluruh citra diri, baik yang dibangun dari pandangan orang lain maupun imajinasi sendiri tentang siapa diri kita dan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan diri sendiri serta orang lain. Erik H. Erikson menjelaskan identitas sebagai sesuatu yang bersifat "psikososial", karena proses pembentukannya berlandaskan pada jiwa individu sekaligus terpengaruh oleh budaya masyarakat. Identitas bukanlah sekadar kumpulan pengalaman atau identifikasi di masa kecil, melainkan sebuah proses penyatuan yang mencerminkan keunikan individu dalam lingkup masyarakat. Secara ilmiah, identitas merupakan sebuah proses sintesis ego yang sebagian besar terjadi tanpa disadari, yang menggabungkan berbagai aspek diri menjadi sebuah kesatuan dan pandangan diri yang baru. Proses ini turut menentukan arah diri dengan menyatukan kembali identifikasi yang berhasil dan konsep diri dari masa kanak-kanak. Proses

identitas bersifat psikososial, artinya individu membangun identitasnya sejalan dengan harapan dan identitas kelompoknya. Selain Erikson, Jonathan Cheek, seorang peneliti kontemporer, juga tertarik pada psikologi identitas. Ia berpendapat bahwa identitas lebih tepat dipahami sebagai konstruk yang bersifat pribadi dan internal, atau sebagai konstruk yang didefinisikan secara sosial dan eksternal. Bagi sebagian orang, aspek terpenting dari “diri” berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti memiliki banyak teman. Namun, bagi yang lain, peran sosial mungkin kurang penting, dan “diri” lebih baik dipahami melalui refleksi diri.

Identitas terbentuk dari karakteristik dan sifat yang berkembang melalui interaksi sosial dan peran dalam kelompok, serta dapat ditinjau dari perspektif sejarah, masa kini, dan masa depan. Identitas juga mencerminkan bagaimana seseorang memaknai diri di mata orang lain, yang pada akhirnya membentuk persepsi diri dan cara mereka memahami keberadaannya. Secara psikologis, identitas diri adalah kesinambungan persepsi tentang diri sendiri yang berbeda namun tetap konsisten, serta diakui oleh lingkungan. Dalam psikologi kepribadian, identitas diri membedakan individu satu sama lain dan membangun pemahaman unik tentang diri. Identitas diri juga merupakan kesadaran yang muncul dari pengamatan dan evaluasi diri, menyatukan semua konsep diri menjadi satu kesatuan. Dari sudut pandang psikologi sosial, identitas diri adalah citra yang dimiliki seseorang. Pembentukan identitas adalah tanggung jawab individu, yang melibatkan penjajakan mendalam tentang diri. Identitas diri adalah bagian terpenting dari konsep diri, memengaruhi cara seseorang memandang dunia, bereaksi, dan menilai diri sendiri sesuai dengan perannya. Identitas diri erat

kaitannya dengan tindakan individu, di mana perilaku seseorang memengaruhi, dan dipengaruhi oleh, identitas dirinya.<sup>20</sup>

#### **a. Aspek-Aspek Identitas Diri**

Aspek-aspek identitas diri menurut Erikson (1968) adalah sebagai berikut:

1. Genetik, yaitu proses pembentukan identitas muncul sebagai suatu konfigurasi yang berkembang secara bertahap dengan keterikatan suatu sifat yang diperoleh anak dari orang tuanya. Sifat ini akan dimiliki oleh anak sesuai dengan pengaruh dan perkembangan yang didapatkan dari orang tua.
2. Adaptif, yaitu pembiasaan remaja atas keahlian-keahlian dan cara remaja dalam membiasakan diri atau penyesuaian remaja dengan masyarakat lingkungan disekitarnya.
3. Struktural, yaitu penyusunan masa depan oleh remaja, dengan kata lain remaja telah merancang kehidupan masa depan yang diinginkan.
4. Dinamis, timbul identifikasi dari masa kanak-kanak individu dengan orang dewasa yang kemudian dapat menciptakan suatu identitas baru dimasa depan atau sebaliknya. Proses identifikasi ini tidak memiliki pengaruh terhadap identitas tetapi yang berpengaruh adalah pemberian posisi dari masyarakat terhadap remaja
5. Timbal balik dalam psikologi, menekankan ikatan yang berbalasan antara remaja dengan masyarakat sosial. Perkembangan identitas tidak hanya terbentuk oleh diri remaja itu sendiri tetapi juga melibatkan ikatan remaja dengan orang lain, komunitas atau masyarakat.

---

<sup>20</sup> Anggraini, R. (2008). Identitas Diri dan Pengaruhnya dalam Interaksi Sosial. Jurnal Psikologi

6. Status eksistensial, yaitu remaja mencari arti dari hidup secara umum.

## 2. Identitas Sosial

Identitas sosial diperkenalkan dan dikembangkan oleh Henri Tajfel pada dekade 1970 dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena prasangka, diskriminasi, perubahan sosial, dan konflik di antara kelompok. Identitas sosial merujuk pada kesamaan dan perbedaan, baik dalam aspek pribadi maupun dalam konteks sosial. Ini mencakup unsur-unsur yang dimiliki seseorang bersama orang lain serta aspek yang membedakan mereka dari individu lain.

Dalam tahun 1979, Tajfel memberikan definisi awal tentang identitas sosial sebagai kesadaran individu akan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu, disertai dengan makna emosional dan nilai-nilai yang penting terkait dengan keberadaan dalam kelompok itu. Kelompok tersebut merupakan sekumpulan individu yang berbagi identitas sosial yang positif. Karakteristik dari kompetisi dan strategi yang diterapkan tergantung pada keyakinan individu mengenai sifat hubungan antara kelompok. Dengan demikian, konsep umum ini kemudian dikenal sebagai "teori identitas sosial", dan dijadikan landasan untuk "teori identitas sosial dalam perilaku antarkelompok".<sup>21</sup>

Identitas sosial adalah representasi diri seseorang yang menjadi anggota suatu kelompok, yang dapat mencakup identitas yang didasarkan pada kewarganegaraan, suku, ras, usia, kepercayaan, dan jenis kelamin. Identitas sosial ini terkait dengan partisipasi, kepedulian, serta rasa bangga akan keanggotaan dalam kelompok tersebut. Berdasarkan teori identitas sosial, individu tidak eksis secara independen dalam kehidupan. Baik dengan sadar maupun tidak, individu merupakan bagian dari

---

<sup>21</sup> Dominic Abrams et al., "Small Group Research The Social Identity Perspective : Intergroup Relations , Self-Conception , and Small Groups," Small Group Research 35, no. February (2004)

kelompok tertentu. Gagasan tentang identitas sosial ini mencerminkan bagaimana seseorang diidentifikasi dalam konteks sosial.

#### **a. Komponen Pembentuk Identitas Sosial**

Berdasarkan pendapat Henri Tajfel, ada tiga elemen utama yang membentuk identitas sosial, yaitu pengelompokan sosial, pengenalan sosial, dan perbandingan sosial.

##### **1) Kategorisasi Sosial**

Komponen awal yang berperan dalam penciptaan identitas sosial adalah kelompok sosial. Henri Tajfel menjelaskan bahwa individu mengelompokkan diri mereka dengan memasukkan diri ke dalam kelompok tertentu. Ini akan memengaruhi kecenderungan mereka untuk bertindak menurut norma dan nilai yang dijunjung oleh kelompok tersebut. Pengelompokan diri terjadi ketika seseorang memandang dirinya sebagai entitas yang bisa dikelompokkan, diidentifikasi, dan dinamai sesuai dengan keterkaitannya dengan kategori sosial lain di sekitarnya. Kategori-kategori ini bisa berupa bermacam-macam tipe kelompok sosial yang berbeda. Proses pengelompokan ke dalam kelompok tertentu ditentukan berdasarkan persamaan individu tersebut dengan anggota lain dalam kelompok yang sama. Oleh karena itu, persamaan inilah yang menjadi faktor penting bagi pembentukan suatu kelompok di mana individu bergabung karena memiliki kesamaan tertentu.

Secara sederhana, pengkategorian berlangsung ketika individu membedakan dan mengklasifikasikan kelompoknya sendiri (in-group) dari kelompok lain (out-group). Dalam hal ini, individu akan memahami posisinya sebagai anggota dari kelompok tertentu dan bagaimana kelompok tersebut berkontribusi dalam pembentukan identitas sosialnya di dalam masyarakat.

Selama proses pengkategorian ini, individu akan lebih menekankan kesamaan dirinya dengan anggota lain dalam kelompoknya (in-group) dan membedakan dirinya dari anggota kelompok lain (out-group).

## 2) Identifikasi Sosial

Pada fase identifikasi sosial, terdapat tiga elemen yang saling berkaitan dalam proses identifikasi sosial, yaitu:

1. Elemen kognitif yang berkaitan dengan kesadaran akan keanggotaan;
2. Elemen evaluatif yang merujuk pada nilai-nilai yang terasosiasi dengan keanggotaan seseorang; dan
3. Elemen emosional yang menyangkut pengalaman afektif individu yang berhubungan dengan keanggotaan tersebut.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Tajfel, identifikasi berkaitan erat dengan identitas sosial individu. Identitas sosial ini mencakup rasa kepemilikan terhadap suatu kelompok, serta aspek emosional dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh kelompok tersebut. Dalam konteks identifikasi, individu terdorong untuk mengembangkan pandangan positif terhadap kelompoknya. Hal ini berpotensi meningkatkan harga diri individu sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Untuk melindungi identitas sosial kelompok, individu atau sekelompok orang sering kali bersedia melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kebanggaan kelompok. Fenomena ini dikenal sebagai efek favoritisme kelompok. Selain itu, selama proses identifikasi, individu cenderung menunjukkan sikap etnosentris

terhadap kelompok mereka, dengan menganggap kelompoknya lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lain.<sup>22</sup>

Dalam identifikasi sosial, ada gagasan tentang identifikasi kolektif yang merupakan elemen dari teori identitas sosial yang dipopulerkan oleh Tajfel. Tajfel juga menciptakan istilah identifikasi kolektif untuk menggambarkan sejauh mana seseorang melihat dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok sosial, yang mencakup perspektif individu terhadap dirinya dan penilaian akan signifikansi kelompok tersebut.

Pada pengenalan kelompok, terdapat definisi diri yang mengacu pada perasaan individu sebagai bagian dari suatu kelompok, di mana mereka merasa sejalan dengan anggota lainnya, serta dimensi investasi diri yang menggambarkan seberapa besar individu menganggap penting untuk menjadi anggota kelompok tersebut. Pengenalan kolektif terdiri dari dua dimensi dan lima aspek. Dimensi investasi diri terbagi menjadi tiga aspek, yakni solidaritas, kepuasan, dan sentralitas; sedangkan dimensi definisi diri mencakup dua aspek, yaitu stereotipisasi diri individu dan homogenitas kelompok dalam.<sup>23</sup>

### 3) Perbandingan Sosial

Setelah individu merasa menjadi bagian dari suatu kelompok dan mengenali kelompok tersebut, langkah berikutnya adalah melakukan perbandingan dengan kelompok lain. Menurut Tajfel dan Turner, proses perbandingan sosial memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu menggunakan kelompok lain sebagai tolok ukur untuk menilai diri

---

<sup>22</sup> Zelika Amanda Amrullah, "Proses Pembentukan Identitas Sosial Di Komunitas Pengemudi Ojek Online" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). Hal.18

<sup>23</sup> Cahyaning Widhyastuti et al., "Pengaruh Identifikasi Kolektif Terhadap Ingroup Criticism (Studi Pada Kelompok Suporter Sepakbola) (Research On Football Fans Club)," Jurnal Ecopsy 5, no. 3 (2018). Hal. 113

mereka sendiri. Identitas sosial terbentuk melalui penekanan pada perbedaan antara kelompok sendiri (in-group) dan kelompok lain (out-group).

Hogg dan Abrams menambahkan bahwa dalam konteks perbandingan sosial, individu cenderung berusaha untuk memiliki identitas yang positif ketika berada dalam kelompoknya. Keinginan untuk mencapai identitas sosial yang positif ini mencerminkan bagaimana psikologi individu beroperasi dalam suatu kelompok. Melalui proses perbandingan sosial, individu membentuk penilaian berdasarkan posisi dan status kelompok mereka. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu memanfaatkan kelompok sosial untuk memperkuat dan mendukung identitas pribadi mereka.

Setelah menjadi anggota suatu kelompok, individu sering kali meyakini bahwa kelompok mereka lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga diri mereka. Dalam kerangka teori ini, identitas pribadi dibentuk melalui proses pengelompokan diri berdasarkan persamaan dan perbedaan dengan anggota kelompok lain. Sementara itu, identitas sosial menekankan pada struktur dan fungsi identitas yang berkaitan dengan keanggotaan kelompok.

Identitas sosial memiliki peran yang sangat penting, karena setiap individu berkeinginan untuk memiliki identitas yang dihargai oleh kelompoknya. Tujuan utama dari pencarian ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, sehingga individu merasakan adanya kesamaan sosial. Laker menjelaskan bahwa jika individu atau kelompok merasa identitas mereka kurang bernilai, maka kemungkinan akan muncul fenomena misidentifikasi. Fenomena ini merujuk pada

upaya individu untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok lain yang dianggap lebih baik.

Contoh nyata dari fenomena ini dapat ditemukan di Amerika Serikat, di mana anak-anak kulit hitam cenderung merendahkan kelompok mereka sendiri dan membandingkannya dengan kelompok kulit putih. Oleh karena itu, Tajfel dan Turner berpendapat bahwa identitas sosial ditentukan oleh kelompok yang diikuti oleh individu. Turner dan Tajfel juga menemukan bahwa individu berusaha untuk meraih atau mempertahankan identitas sosial yang positif. Jika mereka merasa tidak puas dengan identitas sosial yang dimiliki, mereka cenderung bergabung dengan kelompok yang lebih nyaman atau bahkan membentuk kelompok baru yang lebih memuaskan. Dengan demikian, fungsi identitas sosial adalah membantu individu dalam menemukan jati diri, meningkatkan kepercayaan diri, serta memahami diri mereka sendiri melalui cara berpikir dan berperilaku.

### **3. Identitas Budaya**

Budaya dapat didefinisikan sebagai sistem kehidupan yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai unsur, termasuk agama, sistem politik, adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, arsitektur, dan seni. Bahasa, seperti halnya budaya, merupakan elemen penting dari identitas individu dan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang bersifat bawaan. Namun, kemampuan individu untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya lain menunjukkan bahwa budaya pada dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran.

Budaya merupakan keseluruhan cara hidup yang kompleks dan bersifat abstrak, mencakup berbagai aspek kehidupan. Elemen-elemen budaya

memainkan peran krusial dalam membentuk cara manusia berkomunikasi serta berbagai aktivitas sosial yang mereka lakukan. Terdapat hubungan yang erat antara kebudayaan dan masyarakat, di mana setiap aspek kehidupan sosial dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Konsep ini dikenal sebagai Determinisme Kebudayaan.

Lebih lanjut, budaya dapat dipahami sebagai kumpulan simbol, makna, norma, kebiasaan, nilai-nilai, serta cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang dimiliki dan dibagikan oleh anggota suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, budaya tidak hanya mencerminkan cara hidup suatu kelompok, tetapi juga berfungsi sebagai landasan bagi interaksi sosial dan identitas kolektif.<sup>24</sup>

Karakteristik utama kebudayaan meliputi:

- 1) Dimiliki secara turun-temurun dan bersifat historis, yang berarti kebudayaan diciptakan oleh manusia sepanjang sejarah yang dinamis dan terus berkembang.
- 2) Terpengaruh oleh kondisi geografis. Perkembangan kebudayaan tidak seragam di setiap tempat; ada yang berkembang pesat, lambat, atau bahkan stagnan. Interaksi dengan lingkungan membentuk kebudayaan pada komunitas tertentu, lalu menyebar ke tingkat suku, bangsa, wilayah, bahkan seluruh dunia. Di era informasi, terjadi perpaduan dan interaksi budaya global.
- 3) Mengandung nilai-nilai tertentu. Manusia selalu berupaya untuk meningkatkan diri melalui kebudayaan, membentuk nilai-nilai yang kemudian dikembangkan dan diperluas..

---

<sup>24</sup> Alo Liliweri.2001. Gatra gatra komunikasi antar budaya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset hal 4

Komunikasi tidak hanya menunjukkan siapa seseorang, tetapi juga menjadi penanda budaya yang menjadi dasar keberadaannya, sehingga memungkinkan individu mengenali orang lain. Kenneth Burke menekankan bahwa bahasa, sebagai unsur tak benda, sangat memengaruhi identitas budaya. Bahasa merepresentasikan realitas yang kemudian digunakan untuk membandingkan berbagai identitas. Menurutnya, kesamaan antara identitas-identitas selalu bergantung pada penggunaan bahasa, yang krusial untuk memahami makna kata secara denotasi dan konotasi. Identitas budaya adalah karakteristik unik sebuah kebudayaan yang dimiliki kelompok dengan batasan tertentu, berbeda dengan kebudayaan lainnya. Memahami identitas budaya tidak terbatas pada ciri fisik atau biologis, melainkan juga melibatkan penggalan pola pikir, emosi, serta tindakan yang mencerminkan cara kelompok tersebut berpikir, merasakan, dan termotivasi

